

TINJAUAN YURIDIS TENTANG MEKANISME GO PRIVATE

CONDRO HADI PURNOMO / D 101 09 031

ABSTRAK

Tulisan ini berjudul tinjauan yuridis tentang mekanisme go private. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan go private bagi perseroan terbatas terbuka. Sumber penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk melakukan suatu tindakan go private diawali dari persetujuan RUPS independen, kemudian setelah memperoleh persetujuan RUPS independen maka go private wajib dilakukan melalui penawaran tender, setelah itu pasca penawaran tender apabila masih terdapat pemegang saham yang tidak setuju dengan proses go private perusahaan maka diisyaratkan dalam pasal 55 ayat 1 UUPT perusahaan wajib mengusahakan untuk membeli saham yang dimiliki pemegang saham tersebut.

Kata Kunci : *go private, pemegang saham independen, penawaran tender*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam melakukan pembangunan ekonomi nasional suatu Negara dibutuhkan pembiayaan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah mendapatkan dana untuk melakukan pembangunan dari penerimaan pajak dan penerimaan lainnya. Masyarakat dapat memperoleh dana untuk berinvestasi melalui perbankan, lembaga pembiayaan, dan pasar modal. Pasar modal merupakan alternatif pendanaan baik bagi pemerintah maupun swasta. Pemerintah yang membutuhkan dana dapat menerbitkan obligasi atau surat utang dan menjualnya ke masyarakat lewat pasar modal. Demikian juga swasta yang dalam hal ini adalah perusahaan yang membutuhkan dana dapat menerbitkan efek, baik dalam bentuk saham ataupun obligasi dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal.¹

Pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan (atau sekuritas jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, *public authorities*, maupun perusahaan swasta). Pasar modal merupakan salah satu bentuk kegiatan

dari lembaga keuangan non bank sebagai sarana untuk memperluas sumber-sumber pembiayaan perusahaan. Aktivitas ini terutama ditujukan bagi perusahaan yang membutuhkan dana dalam jumlah besar dan penggunaannya diperlukan untuk jangka panjang. Dana dalam jumlah besar dan penggunaan dalam jangka panjang sering kali tidak dapat dipenuhi oleh lembaga perbankan sehingga sumber dana alternatif dapat dicari melalui pasar modal.²

Perusahaan emiten yang ingin menambah modal usaha bisa melakukan penawaran umum (*go public*) dan menjual sahamnya melalui bursa efek dengan bantuan perusahaan efek. Masyarakat yang ingin berinvestasi bisa berinvestasi di bursa efek dengan membeli saham, obligasi, produk derivatif, ataupun reksadana. Produk-produk yang diperdagangkan di bursa efek memiliki potensi keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan produk-produk perbankan (seperti tabungan dan deposito). Namun, produk-produk ini juga memiliki risiko hilangnya seluruh uang yang diinvestasikan.³

Kemitraan pasar modal dan emiten dapat dikatakan sebagai bentuk hubungan

¹ Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, "*Hukum Pasar Modal Di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1

² Adrian Sutedi, "*Segi-segi Hukum Pasar Modal*", Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 2

³ Iswi Hariyani dan R. Serfianto D.P., "*Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*", Transmedia Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 1

yang saling menguntungkan, di mana selama status terbuka atau publik tersebut masih memberikan manfaat bagi perusahaan, maka perusahaan akan mempertahankan status tersebut. Kondisi transaksi saham dari perusahaan yang memberikan pemasukan tambahan bagi perusahaan mengakibatkan perusahaan tersebut tetap mempertahankan status *listed-nya* dibursa. Akan tetapi bila industri pasar modal tidak lagi memberikan manfaat dan bahkan menjadi beban bagi perusahaan, maka secara naluri untuk bertahan hidup (*survival*) maka perusahaan akan memilih untuk keluar dari bursa atau pasar modal atau dengan kata lain menjadi tertutup kembali (*go private*).⁴

Go private adalah aksi perusahaan yang merupakan kebalikan dari *go public*. Jika pada *go public* suatu perusahaan menjual sahamnya kepada publik sehingga menjadi perusahaan terbuka, maka pada *go private* perusahaan terbuka justru statusnya berubah kembali menjadi perusahaan tertutup. Hal itu disebabkan saham-sahamnya dibeli kembali oleh sejumlah kecil pemegang saham emiten sehingga saham-saham emiten tersebut tidak lagi memenuhi syarat terdaftar (*listing*) di bursa efek.⁵

Perhatian dan fokus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam proses *go private* yang dilakukan oleh perusahaan terbuka terletak pada perlindungan kepentingan pemegang saham publik. Pada proses *go private*, OJK berusaha memastikan bahwa tidak ada informasi yang disembunyikan perusahaan, OJK juga mempersyaratkan adanya persetujuan pemegang saham independen dan dilakukannya penawaran tender atas saham yang dimiliki pemegang saham publik.⁶

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penulisan.

Hal ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan hasil dari penulisan dapat sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimanakah pengaturan mengenai *go private* di Indonesia bagi Perseroan Terbatas Terbuka?

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai *Go Private* di Indonesia Bagi Perseroan Terbatas Terbuka

Go private adalah aksi perusahaan yang merupakan kebalikan dari *go public*. Jika pada *go public* suatu perusahaan menjual sahamnya kepada publik sehingga menjadi perusahaan terbuka, maka pada *go private* perusahaan terbuka justru statusnya berubah kembali menjadi perusahaan tertutup. Hal itu disebabkan saham-sahamnya dibeli kembali oleh sejumlah kecil pemegang saham emiten sehingga saham-saham emiten tersebut tidak lagi memenuhi syarat terdaftar (*listing*) di bursa efek.⁷

Menurut Black's Law Dictionary, *Go Private* adalah :

"The process of changing A public corporation by terminating the corporation's status with Securities Exchange Commission as a publicly held corporation and by having its outstanding publicly held shares acquired by a single shareholder or a small group".⁸

Berikut ini beberapa alasan mengapa perusahaan terbuka ingin melakukan *go private*.⁹

- a. Perusahaan merasa lebih untung jika melakukan *go private*.
- b. Biaya menjadi perusahaan terbuka (perusahaan publik) lebih mahal.
- c. Kinerja dan keuangan perusahaan sudah kuat sehingga tidak butuh dana publik.

⁴ Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, D., "Go Publik dan Go Private Di Indonesia", Pranada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 2

⁵ Iswi Hariyani dan R. Serfianto D.P., Op.Cit., hlm. 298

⁶ Boby W. Hernawan dan I Made B. Tirthayatra, "Go Private", hlm. 1

⁷ Iswi Hariyani & R. Serfianto D.P., Op.Cit., hlm. 298

⁸ Dikutip dari Gunawan Widjaja & Wulandari Risnamanitis, D., Op.Cit., hlm. 31

⁹ Iswi Hariyani & R. Serfianto D.P., hlm. 299

- d. Perusahaan tidak perlu membagi keuntungan dengan publik, dan tidak perlu memenuhi beberapa persyaratan lain yang terkait pemilikan saham oleh publik.
 - e. Perusahaan menganggap *listing* di bursa efek tidak lagi memiliki prospek karena kinerja penjualan saham perusahaan yang terus memburuk.
 - f. Adanya kesepakatan tertentu antara pemegang saham mayoritas dengan investor baru yang mensyaratkan perusahaan untuk *Go Private*.
 - g. Sebagai perusahaan terbuka, perusahaan diharuskan untuk menerapkan prinsip keterbukaan sehingga hal ini dapat menguntungkan para pesaing.
 - h. *Go Private* dapat mencegah masuknya pihak luar sebagai pemegang saham pengendali.
Beberapa keuntungan yang diperoleh jika perusahaan melakukan *go private*:¹⁰
 - a. Perusahaan tidak perlu melakukan tindakan yang harus didasari oleh perubahan harga saham.
 - b. Perusahaan dapat melakukan tindakan yang beresiko tinggi, yang apabila tindakan ini dilakukan perusahaan terbuka akan terkena sanksi dari OJK.
 - c. Perusahaan dapat kembali ke perhitungan akuntansi konservatif sehingga pembayaran pajaknya lebih rendah.
 - d. Perusahaan tidak perlu menyiapkan surat-surat yang diwajibkan oleh OJK.
 - e. Perusahaan tidak perlu menerapkan kewajiban keterbukaan informasi.
 - f. Perusahaan tidak terlalu wajib melakukan pembayaran dividen, sehingga dapat mengembangkan permodalan jangka panjang dan melakukan investasi spekulatif.
 - g. Pemilik lama dapat mempertahankan statusnya sebagai pengendali perusahaan.
- Pelaksanaan *go private* dapat dilakukan dengan cara melakukan : (1) penggabungan usaha (merger), (2) peleburan usaha

(fusi/konsolidasi), (3) pengambilalihan usaha (akuisisi), (4) penawaran tender, (5) pembesaran nominal saham (*reverse stock split*).¹¹

Peraturan yang selama ini dijadikan acuan dalam melaksanakan *go private* adalah peraturan mengenai benturan kepentingan dan peraturan mengenai penawaran tender. Kedua aturan ini meliputi peraturan Bapepam dan juga peraturan yang dikeluarkan oleh BEJ. Disamping itu, proses *go private* juga harus mengacu pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.¹²

A. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menjadi sandaran awal dilaksanakannya *go private* adalah:

1. Pasal 21 Ayat (1) UUPT
“Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.”
2. Pasal 21 Ayat (2)
“Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan, maksud & tujuan perseroan serta kegiatan usaha perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal dasar dan modal disetor, dan/atau status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.”
3. Pasal 19 Ayat (1)
“Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.”
4. Pasal 37 Ayat (1)
“Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan:
 - a. Pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari

¹¹Ibid
¹²

¹⁰ Ibid, hlm. 300

<http://blog.ub.ac.id/marisasovia/2013/04/20/go-public-and-go-private/>, diakses tanggal 23 mei 2013

- jumlah modal yang ditetapkan ditambah cadangan diwajibkan yang telah disisihkan.
- b. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atau saham yang dipegang oleh perseroan tanah ini dan/atau perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh perseroan, tidak melebihi 10% dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perseroan, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.”
5. Pasal 37 Ayat (2)
“Pembelian saham, baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan Ayat (1) batal karena hukum”
6. Pasal 37 Ayat (3)
“Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang bertakad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2).”
7. Pasal 37 Ayat (4)
“Saham yang dibeli kembali perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dikuasai perseroan paling lama 3 tahun.”
8. Pasal 38 Ayat (1)
“Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) atau pengalihannya lebih lanjut hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.”
9. Pasal 38 Ayat 2 UUPT
“Keputusan RUPS yang memuat persetujuan sebagai mana dimaksud dalam Ayat (1) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan persetujuan jumlah suara untuk pembahasan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
10. Pasal 61 Ayat (1)
“Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris”.
11. Pasal 62 Ayat (2)
“Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa:
(1) Perubahan anggaran dasar;
(2) Pengalihan atau penjaminan, seluruh kekayaan perseroan yang mempunyai nilai dari 50% kekayaan bersih perseroan; atau
(3) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan perseroan atau pemisahan.”
12. Pasal 62 Ayat (2)
“Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) , perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak lain.”¹³
- B. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Tentang Benturan Kepentingan**
Secara prinsip peraturan ini bertujuan:
1. Melindungi kepentingan pemegang saham independen yang umumnya merupakan pemegang saham minoritas dari perbuatan yang melampaui kewenangan direksi dan komisaris serta pemegang saham utama dalam melakukan transaksi benturan

¹³ Gunawan Widjaja & Wulandari Risnamanitis, D., Op.Cit., hlm. 72-77

kepentingan tertentu (Undang-Undang Pasar Modal Pasal 82 Ayat 2 jo. Peraturan Nomor IX.E.1.).

2. Mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh direksi, komisaris, atau pemegang saham utama untuk melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu (Undang-Undang Pasar Modal Pasal 82 Ayat 2 jo. Peraturan Nomor IX.E.1.).
3. Melaksanakan prinsip keterbukaan dan penghormatan terhadap hak pemegang saham berdasarkan asas kesetaraan, persetujuan pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang ada merupakan keharusan (Undang-Undang Pasar Modal Pasal 86 Ayat 1).¹⁴

C. Persetujuan RUPS Independen

Pertama, perusahaan yang mau melakukan tindakan *go private* wajib menyampaikan agenda RUPS Independen mengenai rencana *go private* beserta “draft” surat edaran bagi pemegang saham kepada OJK, selambat-lambatnya tujuh hari sebelum pemberitahuan. Agenda RUPS biasanya mencakup rencana *delisting*, perubahan status perusahaan dari terbuka menjadi tertutup serta perubahan anggaran dasar terkait, yang secara satu kesatuan biasanya disebut sebagai rencana *go private*.¹⁵

Salah satu hal terpenting yang juga harus diperhatikan adalah penunjukan penilai independen oleh Perseroan untuk melakukan penilaian atas efek atau saham Perseroan. Karena *go private* dilakukan melalui penawaran tender atas saham Perseroan, maka informasi mengenai rencana *go private* sangat mempengaruhi harga saham Perseroan. Untuk menghindari fluktuasi harga, Perseroan dapat mengajukan permohonan *suspend*

perdagangan saham kepada bursa efek di mana perusahaan dicatatkan. Pemberitahuan akan adanya RUPS Independen dan surat edaran kepada para pemegang saham (pengumuman) harus diumumkan dalam surat kabar selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum RUPS. Surat edaran antara lain mencakup alasan dan latar belakang rencana *go private*, penilaian pihak independen atas saham perseroan, pihak yang akan melakukan penawaran tender, harga penawaran yang direncanakan serta ketentuan-ketentuan RUPS dalam rangka *go private*. Panggilan untuk menghadiri RUPS juga harus diumumkan melalui surat kabar dan dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum RUPS.¹⁶

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan sampai tiga kali, yaitu:¹⁷

- a. RUPS Pertama
 1. Harus dihadiri pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
 2. Harus disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% saham pemegang saham independen.
- b. Dalam hal RUPS tidak tercapai kuorum, maka RUPS kedua harus segera dilakukan. RUPS kedua:
 1. Dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili oleh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
 2. Disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
 3. Pemberian suara dapat dilakukan langsung oleh

¹⁴ M. Irsan Nasarudin, Indra Surya, Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarmarman, “Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia”, Kencana, Jakarta, 2010

, hlm. 242

¹⁵ Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, D., Op.Cit., hlm. 81

¹⁶ Ibid

¹⁷ M. Irsan Nasarudin, Indra Surya, Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarmarman, Op.Cit., hlm. 250

pemegang saham atau kuasanya.

c. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka RUPS ketiga harus dilakukan. RUPS:

1. Mendapatkan persetujuan dari OJK;
2. Telah diumumkan kepada masyarakat;
3. Disetujui pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir.

Jika dalam RUPS yang ketiga tidak juga mendapat persetujuan pemegang saham independen, maka transaksi tidak boleh diajukan kembali dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal penolakan.

Pada proses *go private* PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk pada tahun 2013, angka kuorum ini tidak lagi mengacu Peraturan Bapepam No. IX.E.1. Dalam Surat Edaran *go private* yang dikeluarkan PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk disebutkan bahwa OJK telah mengeluarkan Surat No. S-35/D.04/2013 perihal Rencana *Go Private* PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk pada tahun 2013. Melalui Surat OJK tersebut, OJK mensyaratkan bahwa *go private* hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS Pemegang Saham Independen yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 71% saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen, dan disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh total Pemegang Saham Independen. Disamping mengatur mengenai kuorum, Surat OJK tersebut juga mengatur mengenai harga penawaran tender yang harus dilakukan.¹⁸

D. Peraturan Bapepam Tentang Penawaran Tender

Tata cara dan prosedur penawaran tender diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.F.1 tentang Penawaran Tender.¹⁹ Menurut Peraturan tersebut definisi Penawaran Tender adalah penawaran melalui media massa untuk memperoleh efek bersifat ekuitas dengan cara pembelian atau pertukaran dengan efek lainnya.²⁰

Peraturan ini mengisyaratkan harga penawaran tender harus lebih tinggi dari dua harga berikut:

1. Harga penawaran tender tertinggi yang diajukan sebelumnya oleh pihak yang sama dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum pengumuman.
2. Harga pasar tertinggi atas efek dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman.²¹

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan *go private* di Indonesia pada perusahaan terbuka dalam pasar modal Indonesia menunjukkan bahwa setiap perusahaan terbuka yang akan menjadi perusahaan tertutup harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pemegang saham independen dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Pengaturan mengenai *go private* di Indonesia bagi Perseroan Terbatas Terbuka pada saat ini adalah mengacu pada peraturan mengenai benturan kepentingan, dan peraturan mengenai penawaran tender kedua aturan ini meliputi peraturan Bapepam dan juga peraturan yang dikeluarkan oleh BEJ. Di samping itu proses *go private*, juga harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM).

B. Saran

Sampai saat ini belum adanya peraturan khusus mengenai *go private* bukan

¹⁸ <http://www.msdl-indonesia.com/Indonesian/about-us/Pages/Delisting.aspx>, diakses tanggal 21 Januari 2014

¹⁹ Gunawan Widjaja & Wulandari Risnamanitis, D., Op.Cit., hlm. 79

²⁰ Ibid, hlm. 82

²¹ Ibid, hlm. 84

berarti *go private* tidak dapat dilaksanakan, buktinya hampir setiap tahun aksi korporasi ini terjadi, sehingga suatu saat akan menjadi masalah besar jika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak mengatur secara baik pengaturan tentang *go private*. Sebaiknya pemerintah terkait harus membuat aturan mengenai *go Private* dalam suatu aturan yang lengkap. Aturan *go private* memang sudah ada dalam beberapa peraturan seperti Undang-undang dan Peraturan Bapepam namun hendaknya aturan *go private* dibuat dalam Undang-Undang tersendiri dan khusus agar dapat memiliki kekuatan yang cukup untuk mengatur jalannya *go private* di masa-masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- Adrian Sutedi, "*Segi-segi Hukum Pasar Modal*", Ghalia Indonesia-Bogor, 2009
Gunawan Widjaja & Wulandari Risnamanitis, D, "*Go Publik dan Go Private Di Indonesia*", Pranada Media Group-Jakarta, 2009
Iswi Hariyani & R. Serfianto D.P., "*Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*", Transmedia Pustaka-Jakarta, 2010
M. Irsan Nasarudin, Indra Surya, Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarmarman, "*Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*", Kencana-Jakarta, 2010
Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, "*Hukum Pasar Modal Di Indonesia*", Sinar Grafika-Jakarta, 2009

B. Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106)
Peraturan Bapepam No. IX.E.1 Tentang Benturan Kepentingan Tertentu
Peraturan Bapepam No. IX.F.1 Tentang Penawaran Tender
Peraturan BEJ No. I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) Dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham Di Bursa.

C. Website:

- Boby W. Hernawan dan I Made B. Tirthayatra, "Go Private"
<http://blog.ub.ac.id/marisasovia/2013/04/20/go-public-and-go-private/>, diakses tanggal 23 mei 2013

BIODATA PENULIS



NAMA	: CONDRO HADI PURNOMO
TEMPAT TANGGAL LAHIR	: POSO, 20 FEBRUARI 1992
ALAMAT	: Jalan Basuki Rahmat Lr. Basa-basi No. 152 D
E-MAIL	: condro.hadi@yahoo.co.id